

DINAMIKA SEKTOR INFORMAL DI INDONESIA

Prospek, Perkembangan, dan Kedudukannya dalam Sistem Ekonomi Makro

Agus Joko Pitoyo¹

Abstract

Informal economy at long standing cannot be denied from thorough economic development in Indonesia. The informal sector has established since at the beginning of national development. Unideal structural transformation that was happened also becoming a triggering factor for mushrooming this sector. The existence of informal sector indeed has provided abundant employment opportunity. For most urban and rural job seekers, informal sector has become main job alternatives. This fact has globally emerging at macro economic development. Unsurprisingly, the economical prospect of this sector has enabled people to achieve better standard of living. Based on Susenas data, this article focuses on the dynamic of informal sector related to its prospect, progress over time, and position in economic development.

Keywords: employment, informal sector, structural transformation

Pendahuluan

Gambaran umum sektor informal saat ini masih identik dengan aktivitas ekonomi skala kecil, kurang produktif, dan tidak mempunyai prospek yang menjanjikan. Predikat tersebut bermula dari sifat usaha sektor informal yang cenderung sebagai usaha mandiri, teknologi sederhana, modal kecil, relatif tidak terorganisasi, dan ilegal. Argumentasi pun terus bervariasi manakala sifat usaha, prospek, dan kedudukannya dalam sistem ekonomi global diperdebatkan. Kondisinya semakin tidak menentu jika pemerintah lamban memberikan respons, yang diperburuk lagi dengan ketidakpastian upaya pemberdayaan dan intervensi kebijakan yang hendak diterapkan. Sementara itu, di sisi lain, bentuk-bentuk

aktivitas ekonomi skala kecil tersebut akan tetap tumbuh subur, bahkan berkembang seiring dengan pembangunan ekonomi global dan modernisasi (Hugo, 1978; Breman, 1980; Todaro, 1991).

Bagi kelompok "masyarakat kecil", sektor informal laksana pahlawan karena dapat dijadikan sebagai sumber utama dan/atau alternatif pendapatan. Sejak akumulasi penduduk di kota-kota, baik besar maupun kecil, tidak dapat tercakup dalam peluang kerja formal yang ada, penduduk yang tidak mampu berkompetisi di sektor formal cenderung masuk ke sektor informal. Termasuk di dalam kelompok ini adalah penduduk dengan tingkat pendidikan dan keterampilan yang rendah, korban penggusuran, kaum perempuan, dan

¹ Staf pengajar Fakultas Geografi, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

lain-lain. Mereka bekerja seadanya, pada lapangan usaha kecil apa saja yang tidak membutuhkan keterampilan manajerial dan pendidikan tinggi (McGee, 1971; Hart, 1973; Sethuraman, 1981; Mazumdar, 1984; Adams, 1995). Ini berarti sektor informal telah memberikan ruang (baca: alternatif) bagi mereka untuk dapat tetap bertahan hidup daripada menjadi predikat penganggur.

Dinamika sektor informal di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari proses dan paradigma pembangunan yang selama ini dilaksanakan. Tingkat pertumbuhan ekonomi yang semula diunggulkan sebagai indikator makro tercapainya tujuan pembangunan ternyata justru berdampak pada kesenjangan sosial. Model pembangunan yang lebih berbasis pada sektor modern, industrialisasi, mekanisasi pertanian (baca: revolusi hijau), dan pembangunan bias perkotaan cenderung melahirkan ketidakmerataan. Sejak itulah, babak baru dikotomi antara masyarakat desa dengan kota, tradisional dengan modern, kelompok marginal dengan inti, dan formal dengan informal menjadi marak sebagai buah lain dari pembangunan. Seiring dengan perjalanan waktu, dikotomi antara sektor formal dan informal dalam roda perekonomian Indonesia cenderung eksis seakan tidak berakhir; ketika ada sektor formal, di situ pun ada sektor informal, sebagaimana perbedaan antara orang kaya dan miskin.

Sungguhpun eksistensi sektor informal pada pencatatan ekonomi baru dirasakan sekitar tahun 1970, akar jati diri sektor tersebut telah ada sejak dimulainya pemulihan pascaperang dunia II pada dekade 1950 dan 1960. Waktu itu adalah masa kepercayaan kembali ekonomi dunia, ketika negara-negara Eropa, Jepang, dan negara bekas kolonisasi

mulai membangun dan bangkit dari "keterbelakangan". Seirama dengan proses pemulihan ekonomi tersebut, maraklah diskursus seputar model pembangunan di dunia ketiga. Sayangnya, hampir semua model pembangunan lebih bersifat materialis dengan mengedepankan pertumbuhan ekonomi sebagai basis pembangunan. Beberapa indikator keberhasilan pembangunan bermunculan, seperti model *center-periphery* dari Raul Prebisch (1949), model *unlimited supplies of labour* dari Arthur Lewis (1954), dan model *stages of economic growth* dari W.W. Rostow (1960) (ILO, 2002). Kelemahan mendasar dari beberapa model di atas adalah perspektifnya yang cenderung *positivist* daripada *normativist*. Perspektif positivis menganggap kebenaran adalah tunggal, dalam arti model pembangunan dianggap sama untuk semua negara. Pada praktiknya, pembangunan ekonomi berporos pertumbuhan itu diterapkan secara universal di negara-negara berkembang tanpa memperhitungkan aspek sejarah, budaya, dan sumber daya alam yang tersedia. Dengan lain perkataan, perubahan kultural dan politik yang terjadi pada masa transisi, dan ini seharusnya diperhitungkan, agaknya luput dari perspektif para ekonom Barat. Betapa terkejutnya ketika model ekonomi kapitalis yang diharapkan mampu menciptakan banyak peluang kerja terencana justru berbuah pengangguran dan pekerja tidak produktif.

Tulisan ini bermaksud mendiskusikan gambaran sektor informal secara umum di Indonesia, baik secara teoretis maupun empiris. Analisis difokuskan pada empat hal pokok: *pertama*, sejarah dan proses terjadinya; *kedua*, kedudukan dan prospeknya dalam pembangunan ekonomi makro; *ketiga*,

urbanisasi dan perkembangan sektor informal; dan *keempat*, intervensi pemerintah. Demi memperoleh gambaran yang menyeluruh, data disajikan menurut koherensi waktu dengan disertai contoh studi empiris sektor informal yang dilakukan di Provinsi D.I. Yogyakarta.

Asal Usul dan Kedudukan Sektor Informal

Sebagai upaya memahami konteks dan esensi dari sektor informal, telaah asal usul dan perkembangan sektor informal secara historis mutlak diperlukan. Sejak menjadi akademik *discourse* pertama kali di Ghana sekitar tahun 1973, tumbuh kembang sektor informal berjalan dengan pesat, baik di negara maju maupun di negara sedang berkembang (Hart, 1973; Portes, et.al., 1989). Beragam teori pun bermunculan membahas seputar asal usul dan pertumbuhannya. Berger & Buvinic (1989) secara komprehensif menjelaskan perkembangan sektor informal secara multiperspektif. Ada empat teori yang secara konseptual mampu menjelaskan lahirnya sektor informal, yakni *excess of labor supply approach*, *neo-marxist approach*, *underground approach*, dan *neo-liberal approach*.

Teori kelebihan tenaga kerja menjelaskan perkembangan sektor informal berdasarkan konsep *supply* dan *demand*. Menurut teori ini, berkembangnya sektor informal adalah respons terhadap keterbatasan sektor formal dalam menyerap *excess* tenaga kerja. Hal ini terjadi karena ketidaksempurnaan pasar tenaga kerja formal. Disebutkan sektor formal cenderung menggunakan tenaga kerja terdidik disertai dengan persyaratan keahlian tertentu, padahal tenaga kerja yang ada tidak semuanya memenuhi persyaratan tersebut. Sebagai akibatnya, tenaga kerja yang tidak terserap

pada sektor formal akan mencari usaha alternatif yang lebih mudah, yaitu di sektor informal.

Berbeda halnya dengan teori kelebihan tenaga kerja, pendekatan *Neo-Marxist* lebih memandang sistem kapitalis dengan ditandai padat modal dan buta akan distribusi hasil produksi sebagai biang keladi dari tumbuh suburnya sektor informal. Secara gamblang dijelaskan dominansi sistem ekonomi kapitalis akan melahirkan dua kutub yang berseberangan, yaitu sistem ekonomi inti dan sistem ekonomi pinggiran. Ketimpangan hubungan di antara dua sistem ekonomi tersebut berimbas pada ketergantungan ekonomi pinggiran terhadap ekonomi inti. Wujud dari mekanisme tersebut adalah muncul sistem ekonomi kapitalis (baca: formal) dan sistem ekonomi tradisional (baca: informal).

Menurut *underground approach*, sektor informal tumbuh sebagai akibat kompetisi internasional di antara industri-industri besar dunia. Industri berskala besar tersebut lebih menguasai pasar dan selanjutnya dikenal dengan sektor formal. Keberadaan industri berskala besar secara alamiah akan menumbuhkan banyak industri kecil sehingga memunculkan berbagai bentuk persaingan. Persaingan ini akan memaksa industri-industri kecil melakukan berbagai kegiatan informal agar tetap bertahan. Pada tahap berikutnya akan muncul banyak aktivitas informal, baik institusi maupun industri berskala menengah, yang mendukung industri besar dalam kompetisi ekonomi dunia.

Pendekatan keempat dalam menjelaskan pertumbuhan sektor informal adalah *neo-liberal approach*. Sektor informal muncul sebagai akibat berbagai persyaratan birokratis dan administrasi yang harus dipenuhi untuk

menjadi sektor formal (Maldonado, 1995). Akibatnya, banyak unit produksi skala menengah dan kecil tidak dapat memenuhi persyaratan birokratis dan administrasi yang ditentukan. Ketidakmampuan unit produksi di dalam memenuhi berbagai persyaratan dan aturan-aturan untuk menjadi sektor formal mengondisikannya menggunakan cara-cara tersendiri yang tidak sesuai dengan cara-cara di sektor formal. Sektor baru dengan mekanisme usaha tidak beraturan ini selanjutnya disebut sebagai sektor informal.

Senada dengan apa yang diungkapkan oleh Berger & Buvinic (1989), Castells & Portes (1989) menjelaskan lima sebab munculnya sektor informal. *Pertama*, sektor informal merupakan kegiatan ekonomi individu yang muncul sebagai reaksi dari kegiatan ekonomi skala besar dan terorganisasi. *Kedua*, sektor informal merupakan usaha ekonomi bebas sebagai reaksi dari kegiatan ekonomi pemerintah yang telah dikenai pajak dan memiliki jaminan hukum dalam usaha. *Ketiga*, sektor informal merupakan usaha lokal yang tidak mampu berkompetisi secara nasional sebagai reaksi dari adanya intervensi ekonomi skala internasional. Unit-unit produksi dalam suatu negara yang mempunyai tingkat kompetisi rendah akan melakukan usaha sendiri tanpa menggunakan cara-cara atau mekanisme usaha yang dilakukan oleh sektor formal. *Keempat*, sektor informal merupakan unit usaha bayangan (*shadow of production*) sebagai reaksi dari modernisasi dan industrialisasi. Mereka adalah unit-unit ekonomi kecil yang tidak termasuk dalam industri-industri yang telah terorganisasi. *Kelima*, sektor informal merupakan kegiatan ekonomi alternatif yang berskala kecil, manajemen individu, dan tidak terorganisasi

sebagai reaksi dari adanya krisis ekonomi. Krisis ekonomi menyebabkan unit-unit ekonomi yang tidak dapat bertahan pecah menjadi bagian-bagian kecil yang bersifat informal.

Apabila dikaji menurut keterkaitan antarsektor, keberadaan sektor formal dan informal dalam suatu sistem ekonomi akan selalu berdampingan satu sama lain, di mana ada sektor formal di situ ada sektor informal. Keberadaan sektor formal di kota, misalnya perkantoran atau industri, tidak urung akan diikuti dengan maraknya berbagai sektor informal, seperti pedagang kaki lima dan pelayanan jasa-jasa kecil. Secara umum keterkaitan di antara sektor formal dan informal itu bersifat hierarkis, biasanya sektor informal berada pada posisi subordinat (Gerry, 1978; Portes & Walton, 1981; Portes, et.al., 1989). Sektor informal sering dipandang sebagai sistem ekonomi bayangan yang mempunyai posisi tawar-menawar rendah. Schmitz (1982) menambahkan subordinasi sektor informal merupakan imbas dari kelemahan sektor informal sendiri, baik secara internal maupun eksternal. Secara internal, sektor informal mempunyai kelemahan dalam kualitas sumber daya pekerja, manajemen, usaha, dan koordinasi. Secara eksternal, sektor informal berhadapan dengan hambatan struktural, baik dalam bentuk persaingan oleh sektor formal/ sektor pemerintah maupun penilaian dari berbagai institusi yang cenderung menyubordinasikan posisi sektor informal.

Secara teoretis kompleksitas keterkaitan antarsektor di dalam sektor informal dikategorikan oleh El Shaks (1984) menjadi dua tipologi, yaitu *pertama*, sektor informal yang aktivitas ekonominya memberikan layanan penting kepada masyarakat kota, berfungsi melengkapi (substitusi) sektor formal,

seperti pengusaha transportasi, pedagang makanan, warung kobo, dan jasa kecil-kecilan. *Kedua*, tipologi sektor informal dengan kegiatan ekonomi yang bersifat marginal, ilegal, dan cenderung bersifat personal. Aktivitas ekonomi dari tipologi ini biasanya tanpa modal dan lebih menekankan pada kekuatan fisik, seperti pembantu rumah tangga, pengamen, pengemis, dan pemulung. Selain dua tipologi yang dikembangkan oleh El Shaks (1984), keterkaitan antarsektor pada sektor informal dapat dijelaskan dengan menggunakan paradigma harmoni (*normative order*) dan paradigma konflik (Cuff & Payne, 1979; Bottomore & Nisbet, 1978).

Inti dari paradigma harmoni adalah keseimbangan sosial dari dua sistem yang nilainya berbeda. Model ini juga sering disebut model dualistik sosial, di dalam masyarakat transisi akan terbentuk dua sistem sosial yang bersifat paradoks. Sistem sosial yang pertama menggambarkan kondisi tradisional, sedangkan sistem sosial yang kedua merupakan sistem modern. Mekanisme dualistik antara sifat tradisional dan modern tersebut selalu termanifestasi dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, baik dalam hal ekonomi, teknologi, sosial, maupun politik. Kesemuanya berada di dalam suatu hubungan simbiosis mutualisme, saling menunjang, dan keduanya saling memberikan keuntungan, baik secara sosial maupun ekonomi.

Berseberangan dengan paradigma harmoni, paradigma konflik menjelaskan keberadaan sektor informal melalui model dependensia. Sektor informal merupakan sektor yang selalu tergantung pada sektor formal. Dalam hal ini, kadang-kadang terjadi eksploitasi yang dilakukan oleh sektor formal terhadap sektor informal. Pada perkembangan

berikutnya, adanya mekanisme substitusi dan fleksibilitas yang diperankan oleh sektor informal menjadikan sektor ini mempunyai tingkat bertahan hidup yang tinggi dan dapat menjadi sektor penyangga bagi tenaga kerja yang tidak dapat memasuki sektor formal (Portes & Walton, 1981).

Berangkat dari sejarah munculnya yang tidak dikehendaki, sebagai dampak dari model ekonomi kapitalis, sektor informal cenderung dipandang sebagai aktivitas ekonomi tambahan (*tertier*), berskala kecil (*small-scale economic activities*), kurang produktif, dan tidak mempunyai prospek yang menjanjikan. Predikat ini didasarkan pada sifat usahanya yang banyak menggunakan cara-cara tradisional, seperti usaha mandiri, teknologi sederhana, modal kecil, relatif tidak terorganisasi, bahkan ilegal. Faktanya, setidaknya ada tiga hal utama yang penting diperhatikan terkait dengan keberadaan sektor informal: *pertama*, sektor informal bersifat universal, selalu ada di negara maju maupun negara berkembang; *kedua*, sektor informal bersifat heterogen dalam hal jenis usaha, skala usaha dan distribusinya; dan *ketiga*, adanya kecenderungan peningkatan jumlah dan variasi usaha sektor informal. Melihat kondisi tersebut, argumentasi tentang prospek dan kedudukannya dalam sistem ekonomi global pun bervariasi, apakah sektor ini mampu eksis dan berkembang atau justru menjadi benalu dalam sistem ekonomi makro (Hugo, 1978; Breman, 1980; Portes, et.al., 1989; Todaro, 1991).

Seiring dengan perkembangan zaman, debat tentang posisi dan kemungkinan perkembangan sektor informal dalam pembangunan ekonomi global pun terus berlanjut. Dalam hal ini, ada dua kubu yang

saling berseberangan: *pertama* adalah pendapat pesimis yang melihat sektor informal sebagai penghambat pembangunan dan *kedua* adalah paham optimis yang masih mempertahankan keberadaan sektor informal (ILO, 2002). Pendapat pertama disampaikan oleh kaum marginalis yang memandang sektor informal sebagai sektor yang bukan saja menghambat pembangunan ekonomi makro, tetapi juga tidak dapat berkembang sebagai akibat sifat usahanya yang tidak terorganisasi, lokasi usaha tidak teratur, bahkan mengganggu ketertiban dan kenyamanan kota (Benefield, 1975). Dengan adanya berbagai karakteristik subordinat dan marginal tersebut, sampai kapan pun sifat usaha tidak terorganisasi, tidak teratur, modal kecil, dan manajemen rendah akan selalu melekat dan bersifat langgeng. Mempertahankan sektor informal sama artinya dengan mempertahankan kebudayaan kemiskinan. Suatu negara tidak akan pernah maju jika bertumpu pada sektor informal karena adanya berbagai kelemahan mendasar di dalamnya.

Secara konseptual, pendapat kedua yang disampaikan oleh kaum developmentalis lebih memandang sektor informal sebagai sektor

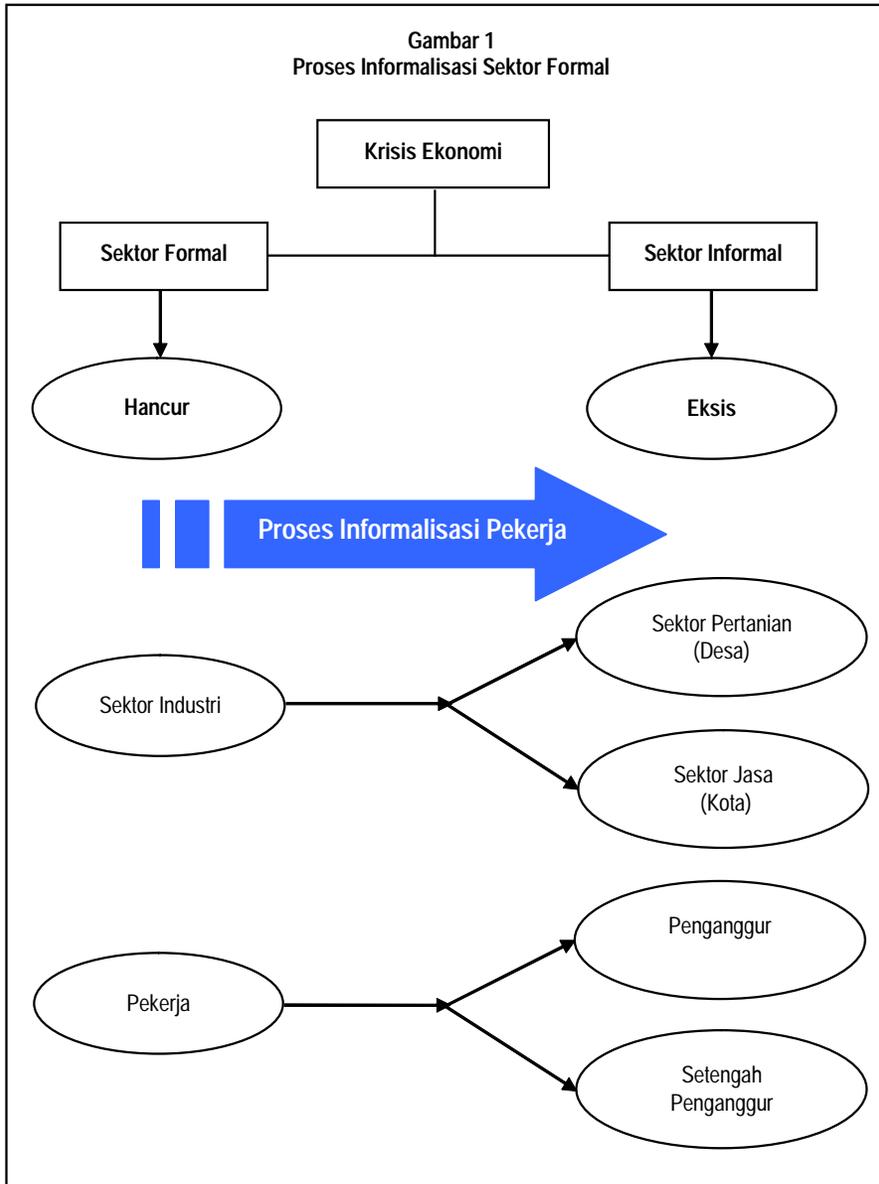
penyangga dalam penyerapan sejumlah besar tenaga kerja secara umum, terlebih lagi ketika kondisi ekonomi sulit, seperti krisis moneter (Maldonado, 1995). Ini cukup beralasan karena sektor informal biasanya menggunakan teknologi sederhana, bahan baku lokal, pekerja mandiri, dan modal yang relatif kecil. Artinya, sektor informal mampu menjadi bagian dari sistem ekonomi rakyat, tidak saja memiliki kapasitas untuk berkembang sebagaimana dengan sektor formal, tetapi juga prospektifnya dalam meningkatkan pendapatan (Souza & Tokman, 1976; Hosier, 1987).

Fakta tentang kemampuan berkembang sektor informal dapat dilihat ketika Indonesia mengalami krisis ekonomi yang puncaknya terjadi sekitar tahun 1998. Pada tahun tersebut perekonomian Indonesia betul-betul carut-marut. Tingkat inflasi sangat tinggi, angkanya mendekati 88 persen dengan nilai rata-rata tukar rupiah terhadap dolar mencapai 10.000. Hal ini diperparah dengan tingkat pertumbuhan ekonomi mendekati angka minus 15 persen (Tabel 1). Satu hal yang sangat menarik kaitannya dengan aspek ketenagakerjaan pada waktu itu adalah terjadinya informalisasi tenaga kerja (*informalisation of labour*) dan

Tabel 1
Indikator Ekonomi Indonesia Menjelang dan Setelah Puncak Krisis

Indikator	Tahun					
	1996	1997	1998	1999	2000	2001
Inflasi (%)	6,47	11,05	77,63	2,01	9,33	12,55
Rerata nilai tukar (US\$)	2.342	2.909	10.014	7.855	8.422	10.261
Tingkat suku bunga (%/tahun)	17	16	22	27	15	14
Pertumbuhan PDR	6,2	3,0	-14,7	-0,5	3,3	1,9

Sumber: ADB dan CIRCLE, 2002



“homisasi pekerja” karena pemutusan hubungan kerja (PHK) (Gambar 1).

Informalisasi dan homisasi (baca: kembali ke rumah) tenaga kerja saat Indonesia diguncang krisis adalah wujud nyata fleksibilitas sektor informal. Terpaan krisis ekonomi dengan diikuti berbagai krisis multidimensi telah menyebabkan banyak

industri besar yang begitu tergantung pada barang-barang impor berhenti beroperasi. Di sisi lain, sektor informal yang memiliki karakter teknologi sederhana, berbahan baku lokal, modal relatif kecil, dan kemudahan dalam beroperasi menjadi tumbuh subur. Sektor informal eksis sebagai komplementer (baca: melengkapi) sistem ekonomi nasional dan

substitusi (baca: pengganti) kebutuhan sektor formal ketika diguncang badai krisis. Terbukti jatuhnya sektor formal kala itu diikuti dengan pemutusan hubungan kerja (PHK) besar-besaran sehingga banyak pekerja yang menjadi setengah penganggur, bahkan menganggur sama sekali. Hal ini telah membuat sektor pertanian di perdesaan kembali mencuat dan sektor jasa di perkotaan berkembang pesat. Perkembangan sektor jasa secara umum cukup beralasan seiring dengan gulung tikarnya sektor formal jika ditilik dari sifat usahanya. Ini dapat dimengerti karena cukup besar lapangan usaha di sektor jasa yang ada di Indonesia adalah usaha informal (Sukamdi, 2001).

Urgensi Sektor Informal dalam Sistem Ekonomi Makro

Pembangunan nasional Indonesia yang secara operasional dituangkan dalam GBHN melalui Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita) merupakan amanat konstitusi yang telah diimplementasikan lebih dari tiga dasawarsa pembangunan. Sejak dicanangkan pada tahun 1968 (Repelita I, 1968-1973) Indonesia membangun demi terwujudnya kemakmuran rakyat dengan ditandai perbaikan taraf kehidupan, peningkatan tingkat penghasilan, peningkatan kualitas SDM, dan pemerataan hasil-hasil pembangunan pada semua lapisan masyarakat. Muaranya yang diimpikan adalah akan terhapusnya kebodohan, keterbelakangan, dan kemiskinan di Indonesia. Terlepas gagal atau berhasilnya cita-cita nasional tersebut, berbagai kebijakan ekonomi pada tingkat makro pun dilaksanakan, seperti trilogi pembangunan. Namun sayang, konsep pembangunan tersebut cenderung menonjolkan pertumbuhan ekonomi ketimbang

upaya mendistribusikan hasil-hasil pembangunan kepada seluruh lapisan masyarakat. Disadari atau tidak, model pembangunan yang lebih mengedepankan pertumbuhan ekonomi berimbas pada kemunculan beberapa permasalahan sosial, seperti kesenjangan ekonomi, pengangguran, dan rendahnya kesempatan kerja.

Dalam konteks ekonomi makro, sektor informal yang bentuk usahanya berawal dari tata perekonomian tradisional, seperti kegiatan perdagangan, industri rumah tangga, dan penyediaan jasa-jasa kecil, telah mewarnai dan menjadi komplementer kegiatan ekonomi nasional. Keberadaan dan perkembangannya pada level nasional telah membantu memecahkan permasalahan terbatasnya peluang kerja yang diciptakan oleh pemerintah. Secara makro sektor informal mampu menopang sistem ekonomi nasional melalui beberapa spesifikasi yang dimilikinya. *Pertama*, sektor informal merupakan penampung kelebihan tenaga kerja pada saat program pembangunan tidak dapat menyediakan peluang kerja bagi seluruh pencari kerja, terutama bagi pencari kerja berpendidikan rendah, keterampilan terbatas, dan kaum marginal. *Kedua*, dalam situasi ekonomi yang tidak stabil, misalnya saat terjadi krisis dan ledakan penganggur, keberpihakan pemerintah terhadap sektor informal dapat dijadikan strategi ampuh meredam gelombang pencari kerja tersebut. *Ketiga*, pada saat sistem ekonomi yang menguntungkan usaha skala besar, sektor informal mampu menyediakan barang dan jasa yang dipergunakan oleh pekerja usaha skala besar. Selain itu, saat Indonesia mengalami krisis ekonomi, sektor informal tetap eksis, tetap melangsungkan kegiatannya, dan yang terpenting

kemampuannya berusaha mandiri tanpa membebani ekonomi nasional.

Sumbangan penting sektor informal dalam merespons “kegagalan” pemerataan ekonomi akibat pembangunan kapitalistik adalah penyerapan tenaga kerja yang luas, baik sebelum maupun setelah krisis ekonomi. Tabel 2 menunjukkan tingginya kemampuan daya serap sektor informal terhadap kelebihan pencari kerja di Indonesia. Sektor ini telah menjadi tumpuan bagi lebih dari sepertiga pencari kerja. Angkanya dari waktu ke waktu cenderung naik, secara keseluruhan terjadi peningkatan pekerja di sektor informal yang cukup signifikan sejak tahun 1993.

Urgensi sektor informal dalam sistem ekonomi makro, selain dilihat dari perannya ketika ekonomi nasional sulit, juga dapat dianalisis melalui transformasi struktural kesempatan kerja. Transformasi atau juga dikenal dengan istilah transisi dalam pembangunan ekonomi adalah istilah yang digunakan untuk melihat perubahan sektor ekonomi dari sektor pertanian menuju industri dan akhirnya bermuara di sektor jasa. Istilah ini pertama kali muncul untuk menjelaskan

perubahan sistem ekonomi di negara-negara Eropa Timur dari sistem ekonomi pertanian menjadi sistem ekonomi kapitalis yang berorientasi pada pertumbuhan ekonomi di sektor industri (Stadelbauer, 2006). Istilah transformasi tersebut juga dipakai oleh negara-negara berpaham sosialis untuk menunjukkan perubahan sistem ekonomi produksi dari pembangunan ekonomi sentralistik menuju sistem ekonomi pasar.

Berdasarkan hasil studi dari desa-desa di Asia, Koppel, et.al. (1994) mempertanyakan proses pembangunan di Asia, apakah betul-betul dapat dikatakan sebagai pembangunan (*development*) atau justru pemburukan (*deterioration*). Koppel, et.al. (1994) memaknai transformasi dalam tiga hal, yaitu perubahan pemanfaatan hasil produksi pertanian dari berorientasi kebutuhan sendiri, dalam arti tidak untuk dijual menjadi produksi pertanian yang berorientasi pada pasar. *Kedua*, transformasi yang dimaknai sebagai perubahan sistem produksi pertanian ke industri. *Ketiga*, transformasi adalah transisi atau peralihan dari perdesaan menjadi perkotaan. Dalam hal ini transformasi tidak saja terkait dengan

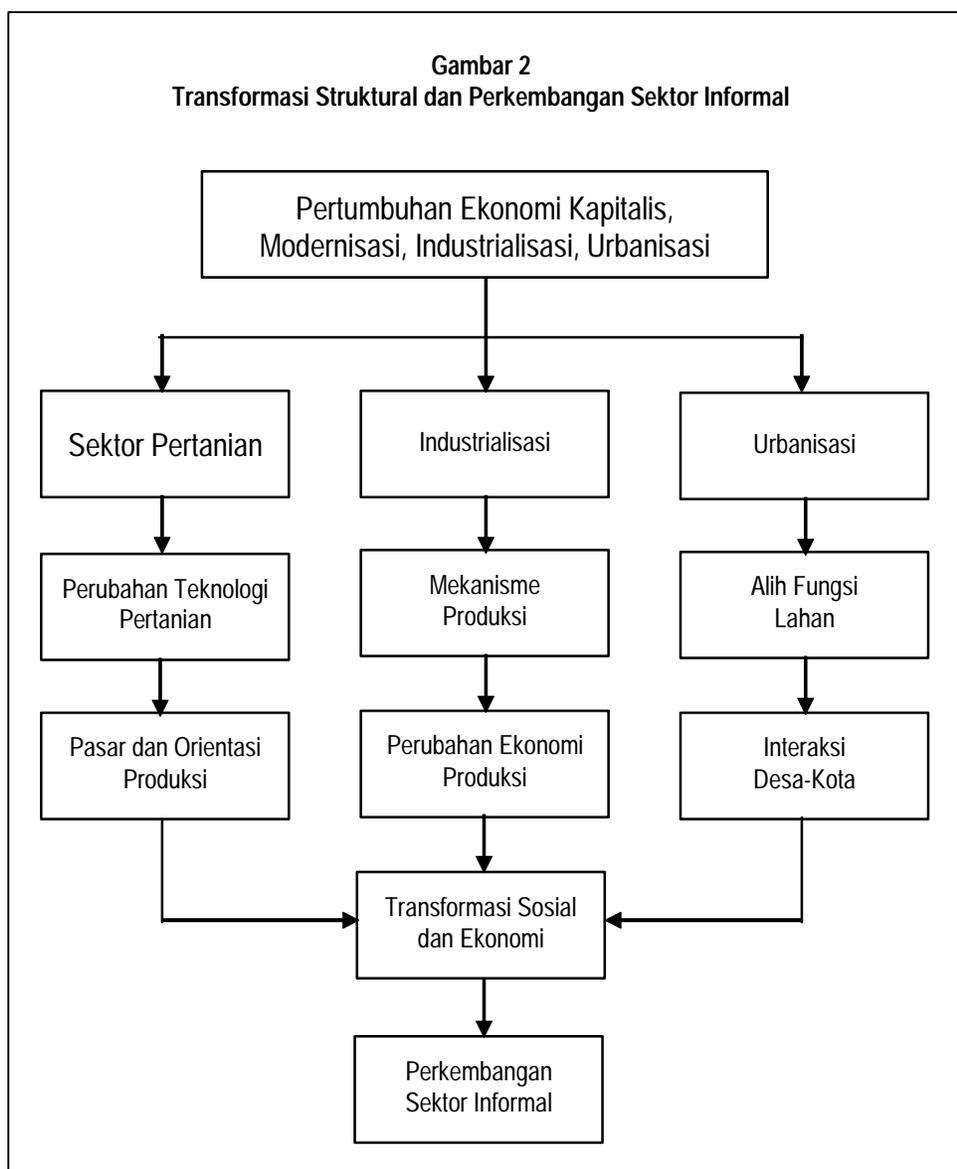
Tabel 2
Penyerapan Kerja Sektor Informal di Jawa

Provinsi	Tahun			
	1993	1997	2000	2003
Jawa Barat	39,71	44,06	47,21	51,89
Jawa Tengah	31,55	35,62	37,25	69,38
Yogyakarta	36,14	41,21	37,35	60,34
Jawa Timur	35,69	40,01	42,53	59,33
Jawa	35,7	40,05	42,37	60,21

Sumber: BPS 1993, 1997, 2000, 2004.

kenampakan fisik wilayah, tetapi juga sosial ekonomi penduduk. Lebih lanjut disebutkan transformasi adalah proses perkembangan ekonomi informal, yaitu proses kompleks terkait dengan berbagai dimensi seperti urbanisasi, industrialisasi, penetrasi pasar internasional sampai di perdesaan, dan perubahan teknologi di bidang pertanian (Koppel, et.al. (1994); Koppel, 1988; Rondinelli, 1986; Jones, 1984) (Gambar 2).

Transformasi ekonomi di Indonesia dimaknai sebagai perubahan struktur perekonomian dari sektor pertanian ke sektor industri atau jasa. Selama periode 1971-2006 telah terjadi pergeseran kegiatan ekonomi penduduk dari sektor pertanian ke nonpertanian. Pertumbuhan sektor industri di Indonesia secara cepat terjadi seiring dengan membungunya harga minyak bumi sekitar tahun 1973 sampai 1979 (Booth, 1990). Waktu



itu pertumbuhan sektor pertanian pun mendapat angin segar dengan adanya keinginan pemerintah menciptakan swasembada pangan, utamanya beras. Karena sektor pertanian berada di perdesaan, pembangunan infrastruktur perdesaan, seperti pembangunan sarana irigasi, jalan, gedung sekolah, dan fasilitas kesehatan, marak dilakukan. Di sisi lain, pertumbuhan sektor industri padat modal terutama di kota juga berjalan pesat. Perbaikan aksesibilitas antara perdesaan dengan perkotaan ini selanjutnya memungkinkan mobilitas sirkuler berlangsung secara intensif (Hugo, 1984). Lambat laun proses interaksi perdesaan dengan perkotaan tersebut membawa perubahan kesempatan kerja; sektor pertanian mengalami penurunan, sementara sektor nonpertanian meningkat.

Sektor pertanian yang pada awal pembangunan nasional dijadikan sebagai lapangan usaha utama penduduk berangsur-angsur menurun dengan digantikannya oleh sektor manufaktur dan jasa. Inilah yang disebut dengan transformasi kesempatan kerja dari sektor primer (baca: pertanian) ke sektor sekunder (baca: industri) dan tersier (baca: jasa). Namun demikian, transformasi ini belumlah ideal seperti yang terjadi di banyak negara maju, yaitu pergeseran dari sektor

pertanian ke sektor industri. Penurunan kegiatan ekonomi sektor pertanian di Indonesia justru diikuti dengan meningkatnya persentase penduduk secara signifikan di sektor jasa. Ini berarti kegiatan ekonomi tradisional nonpertanian menjadi marak di perdesaan, begitu juga sektor informal di perkotaan tumbuh dengan cepat.

Sebagaimana telah diungkap, transformasi ekonomi yang terjadi di Indonesia bukanlah transformasi ideal. Ini berdampak pada sistem ekonomi yang dihasilkan. Transformasi ideal akan mengarah pada sistem ekonomi formal (baca: industri), sedangkan transformasi tidak ideal cenderung menuju ke sistem ekonomi informal (baca: jasa). Pergeseran sektor ideal, yakni dari pertanian menuju industri dan akhirnya menuju sektor jasa setelah terjadinya deindustrialisasi, tidak sepenuhnya terjadi di Indonesia. Meskipun berbagai strategi pembangunan telah diterapkan, ada kecenderungan proses transformasi tidak mengikuti pola yang telah dialami oleh negara-negara maju. Proporsi pekerja yang bekerja di sektor pertanian cenderung menurun, tetapi secara absolut sektor ini menyerap lebih dari separuh pekerja. Sektor industri yang seharusnya menyerap sebagian besar pekerja, hanya mampu menyerap sebagian kecil saja.

Tabel 3
Persentase Penyerapan Tenaga Kerja Sektoral di Indonesia, 1961-2006

Sektor	Tahun									
	1961	1971	1980	1990	1993	1996	1997	2000	2003	2006
Pertanian	71,9	64,2	55,93	53,56	50,68	44,02	41,18	45,3	47,67	44,47
Manufaktur	7,9	8,4	13,17	14,66	15,72	18,1	13,91	16,9	13,85	17,1
Jasa	20,2	22,9	30,29	31,45	33,3	37,88	44,91	37,9	35,48	37,56

Sumber: BPS

Tabel 4
Persentase Distribusi PDB menurut Sektor di Indonesia
Berdasarkan Harga Konstan 2000, 1993-2006

Sektor	Tahun							
	1993	1996	1997	1998	1999	2002	2004	2006
Pertanian	17,74	15,42	14,81	16,90	17,13	15,49	14,61	14,15
Manufaktur	42,95	42,97	43,26	42,75	43,24	42,88	43,44	43,74
Jasa	39,31	41,61	41,93	40,35	39,63	41,63	41,95	42,1

Sumber: BPS, data diolah dari PDB Indonesia menurut sektor.

Sektor jasa yang seharusnya berkembang setelah sektor industri, justru meningkat lebih awal, bahkan menyerap banyak tenaga kerja (Tabel 3). Prospektif di sektor jasa ini semakin meneguhkan betapa sektor informal secara makro sangat berperan dalam pembangunan ekonomi di Indonesia.

Berdasarkan Tabel 3 dan Tabel 4 terlihat pergeseran kesempatan kerja dari pertanian ke industri di Indonesia sebenarnya masih semu. Pernyataan ini dapat dibuktikan dengan beberapa alasan sebagai berikut. *Pertama*, penurunan kontribusi sektor pertanian terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) tidak diikuti penurunan penyerapan tenaga kerja secara proporsional, bahkan sampai tahun 2006 sektor pertanian masih menyerap 44,47 persen tenaga kerja. Sementara itu, sektor industri yang diharapkan dapat menyerap banyak tenaga kerja, ternyata sampai tahun 2006 hanya mampu menyerap 17,1 persen. Hal menarik terjadi pada sektor jasa, peningkatan sektor ini dalam menyerap tenaga kerja cukup signifikan. *Kedua*, proses industrialisasi di Indonesia ditandai dengan lemahnya keterkaitan antarsektor. Pembangunan sektor industri tidak berorientasi pada pembangunan industri dengan mengolah hasil-hasil pertanian.

Kenyataan ini menyebabkan proses transformasi ekonomi di Indonesia menjadi rapuh dan timpang (Khusaini, 2001).

Urbanisasi dan Perkembangan Sektor Informal

Urbanisasi secara umum diidentikkan dengan perpindahan penduduk dari desa ke kota. Pengertian ini tidak sepenuhnya salah, dalam arti makna urbanisasi sesungguhnya tidak sebatas pada perpindahan penduduk dari desa ke kota, tetapi lebih ke arah proses pengotaan. Urbanisasi dalam konteks pengotaan dimaknai sebagai persentase penduduk yang tinggal di daerah perkotaan. Sementara itu, bagi yang awam dengan ilmu kependudukan sering kali mendefinisikan urbanisasi sebagai perpindahan penduduk dari desa ke kota. Padahal perpindahan penduduk dari desa ke kota hanya salah satu penyebab proses urbanisasi di samping penyebab-penyebab lain, seperti pertumbuhan alamiah penduduk perkotaan, perluasan wilayah, dan perubahan status wilayah dari perdesaan menjadi perkotaan (Evers & Korff, 2002).

Proses urbanisasi di Indonesia sangat terkait dengan mobilitas penduduk dari desa ke kota. Perkiraan ini didasarkan pada makin

rendahnya pertumbuhan alamiah penduduk di perkotaan dan relatif lambannya reklasifikasi daerah. Di sisi lain, perpindahan penduduk dari desa ke kota semakin kuat seiring dengan kuatnya kebijaksanaan ekonomi dan pembangunan bias kota (McGee, 1971; Todaro, 1996). Berdasarkan data survei penduduk antarsensus (Supas) 1995, tingkat urbanisasi di Indonesia pada tahun 1995 adalah 35,91 persen. Ini berarti sekitar 35,91 persen penduduk Indonesia tinggal di perkotaan. Terdapat peningkatan sekitar 13 persen dalam kurun waktu 15 tahun dari sekitar 22,4 persen pada 1980. Sebaliknya, proporsi penduduk yang tinggal di perdesaan menurun dari 77,6 persen pada 1980 menjadi 64,09 persen pada 1995 (Herjanto, 2000).

Ada kecenderungan semakin tinggi tingkat urbanisasi suatu kota, maka akan semakin tinggi tingkat perekonomiannya. Negara-negara industri pada umumnya memiliki tingkat urbanisasi di atas 75 persen, sementara untuk negara berkembang hanya berkisar 35 persen sampai dengan 40 persen (Herjanto, 2000). Tingginya tingkat urbanisasi ini disebut dengan istilah *primacy rate*, diartikan sebagai kekuatan daya tarik kota terbesar pada suatu wilayah terhadap kota-kota di sekitarnya. Terkait dengan *primacy rate*, ada dua hal yang

biasanya dikembangkan: *pertama*, mengembangkan perdesaan agar memiliki ciri-ciri perkotaan dengan konsep “urbanisasi perdesaan” (*insitu urbanisation*) (McGee, 2004). *Kedua*, mengembangkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru yang dikenal dengan istilah “daerah penyangga pusat pertumbuhan”.

Sejalan dengan pertumbuhan kota-kota besar di Asia, secara regional Indonesia juga mengalami pertumbuhan kota metropolitan secara pesat, seperti di Jakarta, Surabaya, Bandung, dan Semarang (Tabel 5). Terjadi peningkatan jumlah penduduk kota secara pesat antara 1960 sampai 2000. Pada 1940 tidak ada kota besar di Indonesia dengan penduduk lebih dari satu juta. Cukup mengagumkan, setelah 60 tahun jumlah penduduk di Jakarta, Bandung, dan Surabaya telah jauh dari angka tiga juta. Pertambahan penduduk paling dahsyat terjadi di Jakarta, yaitu 300 persen antara 1960 sampai 2000.

Fenomena menonjol dari urbanisasi secara keseluruhan adalah maraknya aktivitas ekonomi, baik formal maupun informal. Terutama sektor informal, perkotaan adalah ladang luas bagi tumbuh kembangnya sektor ini. Tabel 6 dan Tabel 7 menunjukkan terjadinya peningkatan tajam jumlah pekerja sektor

Tabel 5
Pertumbuhan Penduduk Kota Metropolitan di Indonesia, 1940-2000

Metropolis	Penduduk (juta)				Persentase peningkatan 1960-2000
	1940	1960	1980	2000	
Jakarta	0,8	4,3	6,5	12,0	300
Bandung	0,3	1,0	1,8	3,4	240
Surabaya	0,5	1,0	1,7	3,2	220

Sumber: BPS.

informal di perkotaan. Selama kurun waktu 20 tahun, proporsi sektor informal terhadap total pekerja di perkotaan hampir dua kali lipat, dari sekitar 22,8 persen pada 1971 menjadi 42,4 persen pada 1990. Secara umum terjadi peningkatan pekerja sektor informal di kota dari tahun ke tahun. Berdasarkan pulau-pulau besar di Indonesia, sektor informal di kota terjadi peningkatan pertumbuhan secara signifikan pada 1997-1998, kecuali di Sumatera. Pertumbuhan secara mengejutkan terjadi di Kalimantan, dari sekitar 4,04 persen pada

1993-1994 menjadi 22,93 persen pada 199-2000. Lagi-lagi krisis ekonomi menjadi penjelas semua fakta tersebut. Sektor informal adalah pahlawan ekonomi pada saat krisis.

Menelisik fenomena pertumbuhan sektor informal di kota, terdapat satu pertanyaan mendasar, faktor apa yang menyebabkan terjadinya peningkatan jumlah pekerja secara tajam. Setidaknya ada dua kemungkinan jawaban rasional, *pertama*, sektor informal mampu mengatasi masalah terbatasnya peluang kerja perkotaan akibat dominansi

Tabel 6
Penyerapan Pekerja Sektor Informal di Kota 1971, 1980, 1990, 2000

	Persentase sektor informal				
	1971	1980	1990	2000	2003
Total pekerja sektor informal	61,3	69,57	63,42	64,20	67,47
Pekerja sektor informal di Kota	24,8	35,7	42,4	42,8	46,67

Sumber: Effendi, 2000; BPS 2000, 2003.

Tabel 7
Pertumbuhan Sektor Informal di Kota menurut Pulau Besar di Indonesia 1993-2000

Pulau	1993-1994	1995-1996	1996-1997	1997-1998	1999-2000
Sumatera	9,82	10,28	16,51	2,39	1,27
Jawa	6,05	11,63	7,60	8,81	5,33
Kalimantan	4,04	15,34	-3,63	19,36	22,93
Sulawesi	9,42	19,82	3,81	13,68	-4,03
Lainnya	9,08	25,54	-4,52	19,30	8,03
Total	6,91	12,72	7,60	8,93	5,04

Sumber: BPS.

sektor modern. Keterbatasan peluang kerja di sektor modern memberikan inspirasi bagi pencari kerja dan pekerja di kota yang tidak dapat bersaing pada sektor inti beralih pada kegiatan informal, seperti perdagangan, penyedia jasa-jasa kecil, dan kegiatan industri kecil. *Kedua*, derasnya arus mobilitas penduduk berasal dari desa dan kota-kota pinggiran sekitar.

Sebagai ilustrasi, ketangguhan prospek, kedudukan, dan peran sektor informal di kota secara empiris telah dibuktikan dari hasil studi yang dilakukan oleh Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan UGM pada periode 1998-2001. Hasil penelitian menunjukkan sektor informal terus berkembang dari waktu ke waktu. Sektor informal telah menjadi tumpuan hidup pekerja, baik laki-laki maupun perempuan. Sektor informal tidak hanya dilakukan oleh pekerja dengan tingkat pendidikan rendah, tetapi juga oleh pekerja dengan tingkat pendidikan tinggi. Peningkatan jumlah pekerja dengan tingkat pendidikan SMU dan perguruan tinggi dua kali lebih besar daripada jumlah pekerja berpendidikan SLTP. Pada tingkat rumah tangga, sektor informal telah menjadi sumber utama pendapatan bagi lebih dari 70 persen pekerja.

Intervensi Pemerintah

Ketika suburnya sektor informal di perkotaan dipermasalahkan oleh pemerintah dengan dalih mengganggu ketertiban dan keindahan kota, justru banyak dukungan kepada kegiatan usaha tersebut, terutama seputar prospek dan kemampuan resistennya terhadap gangguan ekonomi makro (Sukamdi, 2001). Para pendukung keberadaan sektor informal balik menuduh pihak pemerintah

sebagai pihak yang paling bertanggung jawab karena tidak mampu menciptakan peluang kerja yang luas kepada khalayak publik. Model pembangunan yang cenderung bias ke kota, berikut industrialisasi dan modernisasi yang tidak menciptakan peluang kerja secara berlimpah dianggap sebagai kesalahan fatal dan seharusnya dikaji kembali. Sebuah studi empiris menyebutkan kegagalan urbanisasi dalam penciptaan peluang kerja karena lebih mementingkan industri besar dan padat modal patut diperhitungkan sebagai sebab berkembangnya sektor informal di Indonesia (Manning, 1985).

Pemerintah sudah seharusnya mempertimbangkan kembali keberadaan sektor informal sebagai salah satu sektor usaha penting dalam pembangunan ekonomi nasional. Terlepas dari sifat usaha dan skala usaha yang relatif kecil, sektor informal ternyata tangguh baik ketika menghadapi badai krisis maupun dalam kondisi normal. Keberpihakan pemerintah terhadap sektor ini tentu saja akan memberikan iklim bekerja yang lebih kondusif sehingga upaya optimalisasi dan akselerasi fungsinya dalam perbaikan ekonomi makro menjadi lebih cepat. Sudah bukan zamannya lagi pemerintah memandang sektor informal dengan sebelah mata, apalagi diikuti dengan tindakan pengusuran membabi buta dengan dalih mengganggu ketertiban

Sebagai contoh adalah kebijakan pemerintah terhadap keberadaan pedagang kaki lima di Indonesia. Pemerintah terkesan masih memandang remeh terhadap peran dan fungsinya dalam pembangunan ekonomi. Salah satu kebijakan yang diterapkan, misalnya penertiban lokasi usaha sesuai dengan Undang-Undang No. 14 Tahun 1992, pemerintah melarang penggunaan kaki lima

(trotoar) untuk berdagang karena mengganggu ketertiban, kebersihan, dan keamanan. Secara “normatif-legalitas” usaha pedagang kaki lima yang menghabiskan bagian trotoar jalan dipandang mengganggu aktivitas pejalan kaki dan menyimpang dari peraturan. Perundangan ini menyiratkan sektor informal harus ditumpas habis sampai ke akar-akarnya.

Perlu diakui secara jujur, keberadaan pedagang kaki lima mempunyai kontribusi yang riil terhadap peningkatan kondisi sosial ekonomi rumah tangga dan daerah. Sebagai contoh, dalam era otonomi daerah, aktivitas usaha pedagang kaki lima merupakan alternatif pengembangan ekonomi rakyat yang akan mempertinggi pendapatan asli daerah. Hal ini dapat dilihat dari sumbangan pedagang kaki lima melalui retribusi luar pasar yang cenderung meningkat dari waktu ke waktu. Selain dari retribusi luar pasar, pedagang kaki lima yang tertata rapi ternyata mempunyai beberapa implikasi positif terhadap pemerintah daerah. *Pertama*, menciptakan peluang kerja sebagai akibat fleksibilitas dan substitusi yang diperankan. *Kedua*, menumbuhkembangkan jiwa kewirausahaan. *Ketiga*, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama bagi pengusaha dan konsumen. *Keempat*, mendukung pariwisata, sebagai contoh pedagang kaki lima di kawasan Malioboro, Blok M di Jakarta, Simpang lima di Semarang, dan sebagainya. *Kelima*, pedagang kaki lima mempunyai keterkaitan *input* dan *output* dari unit usaha yang lebih besar, termasuk di dalamnya sebagai media pemasaran produksi dari industri-industri lain.

Penutup

Keberadaan sektor informal dalam sistem pembangunan ekonomi nasional telah

menunjukkan perannya secara signifikan. Selain ketangguhan, sifat kemudahan dalam hal substitusi dan fleksibilitas usaha, sektor informal juga mempunyai prospek secara ekonomi yang cukup menjanjikan. Seiring dengan pembangunan ekonomi, transformasi sektor usaha dari sektor pertanian ke sektor jasa pada jangka panjang akan menyuburkan keberadaan sektor informal di Indonesia. Hal ini menjadi bukti betapa sektor informal laksana pahlawan pembangunan ekonomi. Sudah selayaknya jika sektor ini dibinakembangkan secara serius, harmonis, dan santun.

Wujud sektor informal perkotaan yang penting untuk dibina adalah pedagang kaki lima. Seirama dengan pertumbuhan banyak kota metropolitan di Indonesia, usaha pedagang kaki lima menjadi dinamis dan terus berkembang. Secara empiris terbukti aktivitas usaha pedagang kaki lima mempunyai prospek yang menjanjikan. Pemerintah pun seyogianya memberikan beberapa bentuk peraturan dalam rangka pembinaan dan pengembangan. Fleksibilitas usaha pedagang kaki lima sangat memungkinkan berkembangnya usaha ini dari waktu ke waktu. Pemerintah diharapkan dapat mengangkat mereka sebagai mitra kerja pembangunan sekaligus memberikan keleluasaan untuk berusaha. Secara legal diperlukan pula jaminan hukum bagi usaha mereka agar tidak disewenang-wenangkan oleh banyak pihak.

Daftar Pustaka

- Berger, M., and M. Buvinic (eds.) 1989. *Women's venture assistance to the informal sector in Latin America*. West Hartford, Connecticut: Kumarin Press.
- Bieneffeld, M. 1975. "The informal sector and peripheral capitalism: the case of Tanzania",

- Bulletin of the Institute of Development Studies*, 6(3): 53-75.
- Booth, Ane dan Peter McCawley. 1982. *Ekonomi orde baru*. Jakarta: Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial.
- Bottomore, Tom and Robert Nisbet. 1978. *A history of sociological analysis*. New York: Basic Book.
- Breman, Jan. 1980. *The informal sector in research: theory and practice*. Rotterdam: The Comparative Asian Studies Programme (CASP), University of Rotterdam.
- Bromley, Ray and Chris Gerry (eds.). 1979. *Casual work and poverty in third world cities*. Chichester: John Wiley and Sons.
- Cuff, E.C., and G.C.F. Payne. 1979. *Perspective in sociology*. London: George Allen & Ulwin.
- Effendi, Tadjuddin Noer. 2000. *Pembangunan, Krisis dan Arah Reformasi*, Surakarta: Muhammadiyah University Press.
- Effendi, Tadjuddin Noer. 1993. *Sumber daya manusia, peluang kerja dan kemiskinan*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- El Shaks, Salah. 1984. "On city size and the contribution of the informal sector: some hypotheses and research questions", *Regional Development Dialogue*, 5(2): 67-81.
- Evers, Hans Dieter and Tadjuddin Noer Effendi. 1992. *Trade and informal sector policy in Central Java*. Yogyakarta: Population Studies Center, Gadjah Mada University.
- Hart, Keith. 1973. "Informal income opportunities and urban employment in Ghana", *Journal of Modern African Studies*, 11(1): 61-69.
- Hidayat. 1978. *Pengembangan sektor informal dalam pembangunan nasional: masalah dan prospek*. Bandung: PPESM, Fakultas Ekonomi, Universitas Padjadjaran.
- Hosier, R.H. 1987. "The informal sector in Kenya: spatial variation and development alternatives", *Journal of Developing Areas*, (24) :338-402.
- International Labour Organization. 1972. *Employment, income and equality: a strategy for increasing productive employment in Kenya*. Geneva.
- Kerner, D.O. 1988. "Hard work and informal sector trade in Tanzania", in Garcia Clark, ed. *Traders versus the state: anthropological approaches to unofficial economics*. s.l.: Westview Press.
- Kompas. 1998. "Kafe artis menjamur, kaki lima menjerit", 24 Agustus, hlm. 17.
- Manning, Chris; Tadjuddin Noer Effendi dan Tukiran, 1996. *Struktur pekerjaan, sektor informal dan kemiskinan di kota*. Yogyakarta: Pusat Penelitian Kependudukan, Universitas Gadjah Mada.
- Mazumdar, Dipak. 1984. "The urban informal sector", *World Development*, 4(8): 655-679.
- McGee, T.U. 1971. "Catalyst or concenter? the role of cities in Asean society", in Jacobson and Prakash, (eds.), *Urbanization and national development*. s.l.: s.n..
- Moir, Hazel dan Soetjipto Wirosardjono. 1977. "Sektor informal di Jakarta", *Widyapura*, 1(9-10): 49-70.
- Portes, A., and J. Walton. 1981. *Labor, class and the international system*. New York: Academic Press.

- Portes, A., and Manuel Castells. 1989. "World underneath: origins, dynamics, and effects of the informal economy", in Alejandro Portes; Manuel Castells and Lauren A. Benton, (eds.), *The informal economy: studies in advanced and less developed countries*. Baltimore: The John Hopkins University Press.
- Portes, A.; Manuel Castells and Lauren A. Benton. 1989. *The informal economy: studies in advanced and less developed countries*. Baltimore: The John Hopkins University Press.
- Roberts, Bryan R. 1989. "Employment structure, life cycle, and life chances: formal and informal sectors in Guadalajara", in Alejandro Portes; Manuel Castells and Lauren A. Benton, (eds.), *The informal economy: studies in advanced and less developed countries*. Baltimore: The John Hopkins University Press.
- Sagir, Soeharso. 1986. "Sumbangan sektor informal dalam penyebaran tenaga kerja", makalah Seminar Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Indonesia. Yogyakarta.
- Sethuraman, S.V. 1981. *The urban informal sector in developing countries, employment, poverty and environment*. Geneva: International Labour Organization.
- Sigit, Hananto. 1989. "Transformasi Tenaga Kerja di Indonesia selama Pelita", *Prisma*, 5(18): 3-14.
- Sinclair, W. 1978. *Urbanization and labor markets in developing countries*. New York: St. Martin's.
- Souza, P.R., and V.E. Tokman. 1976. "The urban informal sector in Latin America", *International Labor Review*, (114): 138-148.
- Sukamdi, 2001. *Laporan Penelitian RUT Studi Tentang Pengembangan Sektor Informal di Yogyakarta*. Yogyakarta: Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan UGM
- Swasono, Sri-Edi. 1986. *Studi kebijakan pengembangan sektor informal*. Jakarta: LSP dan IDS.
- Turnham, David, Bernard Salome, and Antoine Schwarz, 1990. *The Informal Sector Revisited*. Paris : Development Centre of The Organisation for Economic Cooperation and Development.